

GOPAC Indonesia Dorong Sistem Yang Lebih *Fair* Untuk Gerus Korupsi

(Jakarta)—

Global Organization of Parliamentarians against Corruption (GOPAC) Indonesia menginginkan sistem yang lebih *fair* dalam konteks kesetaraan gender di Indonesia. Sistem yang lebih *fair* akan memberikan ruang dan kesempatan lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.

“Peran perempuan dalam aspek pemberantasan korupsi cukup penting. Tetapi ini hanya dapat berpengaruh bila sistem politik menjadi lebih *fair* dalam hal keran keterlibatan perempuan dalam politik maupun pengambilan keputusan,” tutur Dr Nurhayati Ali Assegaf, anggota GOPAC Indonesia, yang juga sebagai anggota Global Task Force on Participation of Society di GOPAC.

Meski demikian, sambung Eva Kusuma Sundari, anggota GOPAC Indonesia, hal ini bukan berarti hanya bicara soal angka alias jumlah perempuan yang duduk di politik. Ini adalah konteks sistem yang lebih *fair* yang dalam konteks ini berarti berbicara mengenai terbukanya peluang wanita duduk dalam posisi-posisi penting, adanya sistem demokrasi mapan, hingga jaminan kesetaraan, keadilan dan kepastian hukum yang kuat.

Berkaca dalam sidang umum South East Asian Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC) yang digelar di Medan tahun lalu, Eva menuturkan bahwa korupsi bukan soal gender, tetapi kultur. “Untuk menanganinya, selain membuka keterlibatan perempuan secara lebih luas, Negara harus konsisten menegakkan hukum dan demokrasi,” tegas Eva.

Kedua anggota GOPAC Indonesia tersebut merespon positif publikasi GOPAC mengenai *Gender Equality in Parliaments and Political Corruption* yang di antaranya merekomendasikan keterlibatan perempuan secara luas di dalam politik termasuk dengan menciptakan sayap perempuan di partai politik, merevisi AD/ART Partai Politik untuk mengakomodasi peran perempuan, membentuk komite kesetaraan di parlemen hingga sistem yang membuka kesempatan seimbang bagi perempuan dan laki-laki untuk duduk dalam posisi pengambil keputusan. Keduanya tetap yakin, bahwa peningkatan jumlah anggota parlemen perempuan di parlemen akan berimbang positif pada gerakan pemberantasan korupsi.

Dalam publikasi tersebut, GOPAC juga menandakan bahwa kesetaraan gender tersebut harus dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan di parlemen hingga berkolaborasi dengan organisasi internasional dan madani untuk kerja-kerja pemberantasan korupsi berikutnya.

GOPAC adalah organisasi anggota parlemen dunia berbasis di Kanada dengan fokus utama pada pemberantasan korupsi. GOPAC hingga saat ini memiliki 50 cabang di lima benua. GOPAC Indonesia merupakan salah satu bagian dari GOPAC di level internasional. Saat ini Ketua GOPAC Indonesia atau yang juga disebut dengan Gugus Tugas DPR anti-korupsi adalah Pramono Anung. **(BKSAP)**.